



PENGUMUMAN
LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA
(Tanggall Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 31 Januari 2024/Periodik - 2023)

BIDANG : EKSEKUTIF
LEMBAGA : KEMENTERIAN KESEHATAN
UNIT KERJA : DIREKTORAT JENDERAL KEFARMASIAN DAN ALAT KESEHATAN

I. DATA PRIBADI

1. Nama : L. RIZKA ANDALUCIA
2. Jabatan : DIREKTUR JENDERAL
3. NHK : 231911

II. DATA HARTA

A. TANAH DAN BANGUNAN

Rp. 9.500.000.000

1. Tanah dan Bangunan Seluas 157 m2/180 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA TIMUR , HASIL SENDIRI Rp. 1.500.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 137 m2/150 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.900.000.000
3. Tanah dan Bangunan Seluas 50 m2/50 m2 di KAB / KOTA KOTA JAKARTA BARAT , HASIL SENDIRI Rp. 1.000.000.000
4. Tanah dan Bangunan Seluas 150 m2/108 m2 di KAB / KOTA BEKASI, HASIL SENDIRI Rp. 1.600.000.000
5. Tanah dan Bangunan Seluas 316 m2/100 m2 di KAB / KOTA KOTA SURAKARTA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 1.500.000.000
6. Tanah dan Bangunan Seluas 149 m2/200 m2 di KAB / KOTA SLEMAN, HASIL SENDIRI Rp. 2.000.000.000

B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN

Rp. 510.000.000

1. MOBIL, TOYOTA YARIS YARIS 1.5 S CVT Tahun 2019, HASIL SENDIRI Rp. 210.000.000
2. MOBIL, HONDA BRIO SATHIA Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 80.000.000
3. MOBIL, TOYOTA SIENNA Tahun 2021, HASIL SENDIRI Rp. 220.000.000

C. HARTA BERGERAK LAINNYA

Rp. 12.500.000

D. SURAT BERHARGA

Rp. ----

E. KAS DAN SETARA KAS

Rp. 1.818.617.972



F. HARTA LAINNYA	Rp.	----
Sub Total	Rp.	11.841.117.972
III. HUTANG	Rp.	477.613.857
IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)	Rp.	11.363.504.115

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari elhkpn.kpk.go.id. Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui elhkpn.kpk.go.id, serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.